

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.P. Parlindungan, 1998, (*Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I*), Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- A.P. Parlindungan, 1998, (*Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian II*), Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- A.P. Parlindungan, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- A.P. Parlindungan, 1998, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Achmad Ali, 2010 “*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*”, Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2006. “*Sosiologi Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang : Kalimashada Press
- Dimiyati, Khudzaifah. Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- H. Tjandrasari, W. Yudho. 2008. “*Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*”. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan UI, Press.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Hardjowigeno, Sarwoto dan Luthfi Rayes, 2005, *Tanah Sawah*, Malang: Bayumedia

- Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya Edisi), Jakarta: Djambatan
- Harsono, Boedi. 2005, *Hukum Agraria di Indonesia Jilid I*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Harsono, Budi, 2002, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan
- Hafid, Erwin. 2021. Pelestarian Lingkungan Perspektif Hadis. Yogyakarta: Quantum
- Isa, Iwan. *Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian*. Jakarta: BPN
- Marhaeni Ria Siombo, “Asas-Asas Hukum Adat”, Modul HKUM4204 Edisi 2
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan. 2004. Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta,. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta
- Salim, Emil, 1988, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES
- Soekanto, Soerjono. 1976. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sunaryati Hartono, 1978, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soekanto, Soerjono. 2008. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siyoto, S., & Muhammad. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: LiterasiMedia Publishing.
- Santoso, Urip. 2020, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta : Kencana.

#### **ARTIKEL DAN JURNAL**

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bahir Mukhammad. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang. *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol 1 No 2
- Djasriain, E.A.S.H.M. (2022) Perizinan Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
- Enggarani, N.S. (2016) "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali," *Law and Justice*, Vol 1 No 1
- Fitri, Ria. 2011. Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13 No 3
- Hapsari, Devy Silvia. 2016. *Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan karanganyar*. Surakarta: UMS

- Harahap, Fitri Ramdhani. 2013. Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society*, Vol 1 No 1
- Imansyah, Nur. 2018. Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (studi pada desa poncowati kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah). Lampung: UIN Raden Intan
- Ismail, Fauzi Kamal. 2013. *Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria. Lex Jurnalica*, Vol 10 No 2
- Kristiyono, Cahyo. 2017. *Implementasi Alih Fungsi Penggunaan Tanah dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di kabupaten Klaten berdasarkan UU NO 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jurnal repertorium*, Vol 4 No 1
- Kusno, “Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2017, Vol 5 No 2
- Lestari, Tri. 2018. Etika Pengelolaan Sumber Daya Tanah Dalam Perspektif Hadis. Lampung: UIN Raden Intan
- Maulana, Husen. 2023. Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non Usaha Mikro Kecil (UMK). *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, Vol 3 No 2

Monsaputra, “Analisis perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan di kota Padang Panjang”, Jurnal Tunas Agraria, 2023, Vol 6 No 1

Purnayudhanto, Rahmat, dkk. 2023. Analisis Perubahan Fungsi Lahan Terhadap Ruang Terbuka Hijau Dalam Kurun Waktu 2004-2022 di Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Jurnal Sains Geografi, Vol 1 No 2

Radjawane, Novyta Uktolseja dan Pieter. 2019. Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang). Jurnal Sasi, Vol 25 No 1

Saripudin. 2015. Konsep Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Reforma Agraria. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 11 No 22

Siswi, Rosianita Dewi Adia. 2011. *Kajian yuridis pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di kabupaten madiun*. Surakarta: UNS

Siregar, Nur Fitryani. Efektivitas hukum. Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya

Syhyuti. 2004. KENDALA PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol 22 No 2

Teja, Mohamad. 2015. Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir Jurnal Aspirasi. Vol 6 No 1

Utomo, Budi, 2011, Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Sukoharjo, Skripsi Diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Wibowo, Joko Satrianto. 2016. Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan. Jurnal Ilmiah Hukum De'jure. Vol 1 No 2

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

\_\_\_\_\_, Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah.

\_\_\_\_\_, Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

\_\_\_\_\_, Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan

Tanah

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

KKPR Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara

Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan

Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

\_\_\_\_\_, Petunjuk Teknis (Juknis) Pertimbangan Teknis Pertanahan 2022.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak

Pengolahan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran

Tanah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang; pengendalian pemanfaatan ruang; pengawasan penataan ruang; pembinaan penataan ruang; dan kelembagaan penataan ruang.

\_\_\_\_\_, Peraturan Bupati Boyolali No.71 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan NonBerusaha, dan NonPerizinan Kepasa Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## **WEB**

<https://soloraya.solopos.com/pengurukan-sawah-di-desa-geneng-sukoharjo-diprotes-petani-diduga-langgar-izin-1753950>

<https://m.antaranews.com/amp/berita/1141524/warga-terdampak-proyek-tol-minta-prioritas-pengeringan-lahan>

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/13/152753521/izin-pembangunan-perumahan-di-lahan-sawah-dilindungi-tetap-berlaku?page=all>

<http://www.tempointeraktif.com>



<https://doi.org/10.35334/bolrev.v4il.1397>

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533>

[https://www.academia.edu/download/68319794/Buku\\_Penelitian\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Penyelenggaraan.pdf](https://www.academia.edu/download/68319794/Buku_Penelitian_Implementasi_Kebijakan_Penyelenggaraan.pdf).

<https://repo.undiksha.ac.id/2871/3/1613021037-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

<https://www.gramedia.com/best-seller/perbedaan-tujuan-danmanfaat/#:~:text=kajian%20lebih%20lanjut.,2.,bagi%20dirimu%20sendiri%20sbagai%20penulis>.

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Seperti%20yang%20telah%20disinggung%20sebelumnya,mendapatkan%20hasil%20dari%20penelitian%20tersebut>.

<https://dpmptsp.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

<https://bappeda.semarangkota.go.id/packages/upload/materi/46PpsV02Bx.pdf>

<https://e-journal.uajy.ac.id/8897/3/2MIH02214.pdf>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong/baca-artikel/14985/Pelaksanaan-Konsolidasi-Tanah-Sebagai-Upaya-Meningkatkan-Efisiensi-dan-Produktivitas-Pemanfaatan-Tanah-Perkotaan.html#:~:text=Konsolidasi%20Tanah%20adalah%20kebijakan%20pertanahan,dengan%20melibatkan%20partisipasi%20aktif%20masyarakat>.

<https://ptun-yogyakarta.go.id/alur-penyelesaian-sengketa-penetapan-lokasi/#:~:text=Penetapan%20Lokasi%20adalah%20penetapan%20atas,tanah%20dalam%20Pengadaan%20Tanah%20bagi>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40930/t/Pengusaha+Pengembang+Harus+Perhatikan+Alih+Fungsi+Lahan+Pertanian+Jadi+Permukiman#:~:text=Dampak%20alih%20fungsi%20lahan%20pertanian,sayur%2C%20dan%20lain%20lain>.

<https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt574fdd38584f7/permasalahan-dan-solusi-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-infrastruktur>